



RIGHTS AND RESOURCES INITIATIVE | NOVEMBER 2020

Di tengah krisis COVID:
*Undang-Undang Baru di Asia yang Mendukung Bisnis dengan
Mengorbankan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas
Wilayah dan Tanahnya*

Di Asia Selatan dan Asia Tenggara

Asia Indigenous Peoples Pact

Koalisi untuk Keadilan Tenure Indonesia

Rights and Resources Initiative

Daftar Isi

Pendahuluan.....	3
Konteks HAM Selama COVID-19: Menutup Ruang Demokrasi.....	5
Bagian 1: Proses Legislatif Kontroversial	6
Bagian 2: Stimulus dan Kompensasi bagi Korporasi.....	8
Bagian 3: "Solusi" Pandemi yang Menggerogoti Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal	11
Kesimpulan.....	12
Tentang Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP).....	14
Tentang Koalisi untuk Keadilan Tenure di Indonesia.....	14
Tentang Rights and Resources Initiative.....	14
Mitra.....	15
Sponsor.....	15

Pendahuluan

Planet kita sedang menghadapi krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat virus Corona COVID-19. Pada 29 September 2020, [lebih dari 1 juta](#) orang telah meninggal karena virus tersebut. Dampak pandemi yang berkepanjangan pada awalnya menyebabkan krisis kesehatan dan kemudian mendorong terjadinya krisis [pangan](#) dan ekonomi yang kompleks.

Di antara kelompok yang paling rentan terhadap dampak COVID-19 adalah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, (MAKL) yang sudah mengalami ketidaksetaraan, stigma, dan diskriminasi. Minimnya akses mereka kepada layanan perawatan kesehatan dasar, sanitasi, dan internet yang terbatas untuk *platform* pendidikan daring adalah beberapa [masalah struktural yang memengaruhi kemampuan masyarakat](#) untuk mengatasi dampak pandemi ini. Namun, ketika MAKL memiliki hak dan menjalankan kebebasan bertindak sesuai aturan adatnya, mereka lebih mampu mengatasi krisis kesehatan sebagai dampak COVID-19 dan akibat lanjutannya seperti krisis pangan dan ekonomi.

Kemampuan MAKL mengatasi krisis akibat dampak COVID-19 terjadi karena mereka memiliki hak penuh terhadap tanah atau wilayah adatnya, ekosistem yang sehat dan produktif, dan adanya penghormatan terhadap kehendak MAKL untuk setuju atau tidak terhadap berbagai proyek pembangunan melalui proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC – free and prior informed consent).

[Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal \(MAKL\) mengelola secara tradisional lebih dari 50% permukaan daratan bumi](#), namun hanya 10% dari wilayah ini yang mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah dan wilayah adat mereka.¹ Ketidakpastian hak tenurial ini membatasi potensi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk menerapkan cara-cara lokal dalam pencegahan dampak COVID-19, misalnya dengan isolasi sukarela². Selain itu, tanpa penguasaan tanah dan wilayah adat yang terjamin, kekayaan sumber daya alam mereka berisiko menjadi sasaran karena pemerintah berupaya merespon ancaman resesi ekonomi global dengan memperluas ekonomi ekstraktif. Akhirnya, pandemi telah menyebabkan penurunan penegakan hukum terkait hak atas tanah, peningkatan perampasan tanah, dan kriminalisasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang memperjuangkan hak-hak dasar mereka atas sistem sosio-ekologi yang mereka kelola.³ Dengan demikian, di luar implikasinya pada kesehatan masyarakat, COVID-19 merupakan 'pengganda ancaman' terhadap hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alamnya.

Rilis *Global Biodiversity Outlook* kelima baru-baru ini oleh Sekretariat CBD menemukan bahwa semua Target Keanekaragaman Hayati Aichi tidak dipenuhi oleh pemerintah dan hanya enam di antaranya yang

¹ Hak kolektif atas tanah dan sumber daya yang aman diakui secara luas oleh aktor negara dan non-negara sebagai kontribusi terhadap kemajuan [tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan](#) yang ditetapkan secara internasional. Dalam praktiknya, badan legislatif nasional lamban dalam memformalkan rezim tenurial yang mendukung komunitas dan praktik tradisional masyarakat adat, komunitas lokal dan perempuan pedesaan.

² Beberapa desa tribal di Benggala Barat, India, bersikap proaktif dalam menanggapi COVID-19 dengan memberlakukan [karantina wilayah sendiri dan pekerja migran yang melakukan isolasi mandiri](#) sekembalinya dari ruang perkotaan.

³ Asia Indigenous Peoples Pact. (2020). Penyampaian oleh Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) dan organisasi serta jaringan anggotanya sebagai tanggapan parsial atas 'Panggilan Laporan Masukan' dari Pelapor Khusus tentang Hak-Hak Masyarakat Adat kepada Majelis Umum Dampak COVID-19 pada Masyarakat Adat di Asia. Diambil dari https://aippnet.org/wp-content/uploads/2020/06/Final_AIPP_UNSRIP-June2020.pdf

diselesaikan sebagian dalam satu dekade terakhir ini.⁴ Krisis ekonomi global dan solusi “bisnis seperti biasa” telah membahayakan target lingkungan dekade berikutnya bahkan sebelum diratifikasi secara resmi. Mengejar pembangunan ekonomi dengan mengorbankan keadilan sosial dan lingkungan akan merusak cara hidup Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal serta kesejahteraan dan kesehatan kita semua di planet ini. Untuk keluar dari pandemi ini dengan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, kita membutuhkan perubahan inklusif dan transformatif yang memperbaiki ketidakadilan yang mendasar seperti ketidakpastian tenurial, marginalisasi politik, dan diskriminasi sosial terhadap komunitas yang mengelola lebih dari separuh bumi ini.

Laporan singkat ini membahas perkembangan produk legislatif selama COVID-19 di India, Indonesia, dan Filipina yang berdampak pada interaksi berkelanjutan antara lingkungan dan manusia serta [penikmatan hak yang lebih luas oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas wilayah adat mereka](#). Walaupun India, Indonesia dan Filipina belum meratifikasi Konvensi Masyarakat Adat dan Suku, 1989 (No. 169) (ILO 169), ketiga negara tersebut telah meratifikasi Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Masing-masing negara ini juga telah mendorong reforma agraria tingkat nasional atas tanah dan hutan, meskipun implementasinya lemah.⁵

Dalam ringkasan ini, pertama-tama kami menyampaikan konteks COVID-19 di setiap negara yang menjadi fokus. Proses legislatif yang disajikan di sini terjadi bersamaan dengan tanggap pandemi tiap negara, termasuk karantina wilayah yang dipimpin oleh negara, yang menjadi konteks penting. Kemudian, kami merangkum perkembangan legislatif melalui tiga tema yang terkadang tumpang tindih:

1. Kemajuan oportunistik dalam proses legislatif yang sudah jadi kontroversial sebelum masa COVID.
2. Stimulus dan kompensasi bagi korporasi.
3. “Solusi” pandemi dari atas ke bawah yang menggerogoti hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.

Kami menemukan bahwa di India, Filipina, dan Indonesia, inisiatif pemerintah tetap melanjutkan agenda pembangunan pra-COVID yang telah meningkatkan kemungkinan penyakit yang ditularkan melalui vektor seperti COVID-19 ini berkembang biak dan memasuki inang manusia.⁶ Berbagai kegiatan ini telah merusak agenda global untuk mengatasi perubahan iklim dan berkurangnya keanekaragaman hayati, serta akan terus berlanjut jika solusi tanggap pandemi berbasis masyarakat dikesampingkan, dan respon yang merusak lingkungan hidup tetap diprioritaskan.

⁴ Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati. (2020). *Global Biodiversity Outlook 5. Montreal*. Diambil dari <https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf>

⁵ Rights and Resources Initiative. (2018). *At a Crossroads: Consequential Trends in Recognition of Community-Based Forest Tenure from 2002-2017*. Diambil dari Rights and Resources Initiative, Washington D.C.: https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2019/03/At-A-Crossroads_RRI_Nov-2018.pdf; Kumar, K., Singh, N. M., & Rao, Y. G. (2017). *Promise and Performance of the Forest Rights Act. Economic & Political Weekly*, 52(25-26).

⁶ Penyakit zoonosis [sering terjadi](#) dan [penyebarannya telah lama dikaitkan dengan industri pertanian, pasar satwa liar, deforestasi dan degradasi lingkungan](#). Berbagai dinamika ini menciptakan [lingkungan ideal bagi patogen](#) untuk berkembang biak dengan cepat dan bermutasi melintasi reservoir spesies yang jika tidak demikian tidak akan melakukan kontak dekat dengan populasi manusia yang lebih besar. COVID-19, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan kegiatan ekonomi yang berkontribusi pada degradasi lingkungan semuanya saling terkait.

Konteks HAM Selama COVID-19: Menutup Ruang Demokrasi

Walaupun karantina wilayah adalah komponen strategis penting dari respons yang bertujuan untuk meminimalkan penyebaran patogen mematikan, karantina wilayah juga dimanfaatkan oleh pihak berwenang untuk mencegah mobilisasi publik.

Filipina adalah contoh ekstrem di mana karantina wilayah dan keadaan darurat nasional digunakan untuk meningkatkan represi dengan respons yang sangat militeristis terhadap COVID-19. Pada 24 Maret 2020, Presiden Duterte mengkonsolidasikan kekuasaan eksekutifnya melalui Undang-Undang Republik No. 11469 (Undang-Undang Bayanihan), yang mendelegasikan kekuasaan legislatif kepada presiden selama keadaan darurat nasional. Duterte sekarang dapat memperoleh dana dari cabang pemerintahan lainnya untuk mendanai paket stimulus dan proyek pembangunan. Undang-Undang Republik No. 11332 berikutnya membuat pedoman untuk Karantina Komunitas yang Ditingkatkan (ECQ) yang sedang berlangsung. Bersama-sama, kedua UU ini digunakan untuk mendorong agenda pembangunan Duterte sambil menghambat organisasi publik dan selanjutnya melanggar hak-hak sipil, politik, dan sosial-ekonomi rakyat.

Pada 1 April, Presiden Duterte memperluas kebijakan "tembak mati" kepada pasukan keamanan, yang menysasar "pembuat onar" yang memprotes ECQ. Dalam 20 hari pertama ECQ, lebih dari 17.000 orang ditangkap karena melanggar jam malam dan karantina wilayah. ECQ telah berdampak parah pada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dengan menghalangi mereka untuk mengakses sumber daya alam penting, melakukan kegiatan ekonomi, mengurus ladang mereka, dan komunitas lain yang membutuhkan bantuan. Misalnya, pada 6 April, sekitar 100 polisi dengan keras membubarkan barikade Tuwali-Ifugao yang dibuat untuk menghentikan berlanjutnya operasi penambangan OceanaGold. Beberapa pemimpin adat dituduh melanggar ECQ. Pada 5 Juni, UU Bayanihan kedaluwarsa dan pada 11 September, UU Bayanihan 2 ditandatangani sebagai undang-undang oleh Presiden Duterte, sehingga memperpanjang kewenangan khususnya sampai 19 Desember. Dengan ini, dana tambahan sebesar US\$ 34 juta untuk mengatasi krisis kesehatan telah disediakan dengan fokus pada menghidupkan kembali ekonomi.

Contoh kriminalisasi dan penggusuran juga terjadi di **Indonesia** dan **India**. Di **Indonesia**, selama periode pandemi tercatat 37 konflik agraria baru, 39 petani, masyarakat adat, nelayan ditangkap, dan 2 orang tewas dalam konflik agraria (data KPA). Perampasan lahan petani, penggusuran paksa dan pemindahan masyarakat keluar dari tempat tinggal mereka masih terus terjadi, meskipun Indonesia sedang menghadapi krisis kesehatan dan pangan, serta resesi ekonomi akibat pandemi.

Di **India**, pengumuman karantina wilayah dalam semalam pada bulan Maret menyebabkan jutaan pekerja migran terdampar di ruang perkotaan dan terpaksa berjalan ratusan kilometer ke rumah mereka di tengah kelaparan, represi polisi dan kematian. Namun, pembatasan pergerakan tidak diterapkan pada sektor pertambangan India, yang telah dianggap penting dan praktik imbalan aforestasi terus berlanjut untuk menggunduli hutan dan kemudian melakukan aforestasi di tanah yang diklaim dan digunakan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.⁷ Selama beberapa bulan terakhir, telah terjadi serangkaian insiden penggusuran, termasuk untuk pembangunan waduk dan inisiatif konservasi.⁸ Sementara itu, intimidasi

⁷ Praktik pelabelan pertambangan sebagai layanan "esensial" telah diamati di negara lain seperti Afrika Selatan, Peru, Kanada, Guyana, dan lainnya.

⁸ Di Kaimur, Bihar, 50.000 orang, dari 108 desa, diperkirakan akan digusur untuk cagar harimau.

terhadap para aktivis terus meningkat. Misalnya, *Fridays for Future* di India, sebuah gerakan pemogokan iklim global yang dipimpin oleh kaum muda, mendapat peringatan pada [tanggal 8 Juli berdasarkan Undang-Undang \(Pencegahan\) Kegiatan Melanggar Hukum \(UAPA\)](#) dan situs webnya kemudian diblokir. Setelah kemarahan publik terhadap pelabelan pemuda pencinta lingkungan sebagai 'teroris', polisi Delhi mencabut peringatan tersebut dengan mengklaim itu sebagai [kesalahan administratif](#). UAPA adalah undang-undang terkait terorisme dan digunakan melawan *Fridays for Future* karena kampanyenya menentang draf baru AMDAL 2020 (lihat Bagian 1 di bawah). Dalam peringatan tersebut, polisi Delhi menyebut *Fridays for Futures* menganggu "[kedamaian, \[dan\] kedaulatan India](#)"

Bagian 1: Proses Legislatif Kontroversial

Sebelum krisis COVID-19, ketiga negara mengejar agenda pembangunan neoliberal yang berpihak pada kepentingan elit dan pelaku bisnis antara negara dan di dalam negeri, sehingga merusak tatanan ekosistem komunitas. Banyak dari undang-undang ini mendapat perlawanan keras selama beberapa bulan menjelang COVID-19, dan lembaga legislatif bersikukuh membahas rancangan undang-undang tanpa partisipasi publik.

Di **Indonesia**, Pemerintahan Presiden Joko Widodo menggunakan COVID-19 untuk mendorong proses legislatif kontroversial yang dikritik secara luas sebelum pandemi. Proses legislatif tersebut dinilai oleh sebagian besar masyarakat sipil akan melemahkan perlindungan lingkungan hidup, memungkinkan kelompok bisnis menguasai tanah secara luas (bank tanah), dan menghambat Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dalam mempraktikkan pengelolaan sumber daya alam secara tradisional dan berkelanjutan.

- **Omnibus Law untuk mempermudah perizinan usaha.** Undang-undang Cipta Kerja, yang dikenal sebagai Undang-Undang Sapu Jagat (*Omnibus Law*), disahkan pada tanggal 5 Oktober, meskipun ditentang keras oleh kaum petani, Masyarakat Adat dan organisasi lingkungan hidup, serikat buruh, gerakan mahasiswa. Undang-Undang ini adalah kumpulan pasal yang merevisi besar-besaran untuk menderegulasi bisnis melalui lebih dari [1.000 amandemen pasal pada sekitar 79 undang-undang](#). *Omnibus Law* menderegulasi sektor pertambangan, mengurangi hukuman atas pelanggaran lingkungan hidup, menghapus persyaratan untuk AMDAL, menciptakan kondisi yang membuka ruang untuk korupsi dan menutup partisipasi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari proses pengambilan keputusan. Norma-norma hukum pada *Omnibus Law* [berbenturan dengan undang-undang pemerintahan daerah](#), dan kemungkinan besar akan mengarah pada terjadinya sengketa kewenangan antar pemerintah. Sejak RUU tersebut disahkan, [beberapa versi](#) telah beredar, masing-masing dengan perbedaan yang mencolok, yang menyebabkan ketidakjelasan bentuk akhir *Omnibus Law* yang akan diundangkan. Satu perbedaan penting tersebut adalah pelarangan praktik berladang tradisional yang menggunakan pembakaran untuk membuka lahan pertanian, sementara [hukuman bagi perkebunan yang menggunakan api untuk membuka hutan](#) menjadi lebih sulit untuk diterapkan. Juga diketahui bahwa [dua belas politisi](#), yang berperan penting dalam mengusung undang-undang tersebut, memiliki hubungan dengan sektor pertambangan. Dalam dua minggu sejak protes dimulai, lebih dari [6.000 orang](#) telah ditangkap.

Gelombang protes yang diakibatkan oleh UU baru ini terancam oleh UU Karantina Kesehatan yang selama ini belum digunakan.

- **Perampasan tanah melalui bank tanah.** *Omnibus Law* tersebut disertai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66/2020 tentang Pengadaan Tanah bagi Proyek Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perpres No. 66/2020 [ditandatangani dan disahkan pada 19 Mei 2020](#) dan menghidupkan kembali ketentuan dari draf RUU Pertanahan yang kontroversial mengenai Bank Tanah. Hal ini secara dramatis akan mempercepat perampasan tanah di wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal serta membahayakan keutuhan lanskap hutan alam yang luas dan wilayah yang dihuni oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal.
- **Pengakuan hutan adat berjalan lambat.** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan baru No. 17 tahun 2020 terkait Hutan Adat, yang membuat prosedur pengakuan dan perlindungan hutan adat menjadi lebih lama. Klaim yang menunggu keputusan penetapan hutan adat yang diajukan oleh Masyarakat Adat, bersama dengan peta wilayah mereka, sudah mencapai 6 juta hektar. Namun, keluarnya Peraturan Menteri yang baru ini berpotensi memperumit pengakuan dan perlindungan hutan adat.

Pemerintah BJP **India** sedang berusaha untuk secara sistematis membatalkan serangkaian hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan atas nama mendorong investasi di tengah COVID-19 serta meningkatnya ketegangan ekonomi dengan China. Sektor pertambangan telah menjadi fokus utama dari kemunduran ini.

- **Draf Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 2020.** Kementerian Lingkungan, Hutan dan Perubahan Iklim India merilis [draf pemberitahuan AMDAL 2020](#) pada Maret 2020, yang mengusulkan pengurangan audiensi publik, pelemahan proses konsultasi, pengampunan bagi proyek dengan pelanggaran lingkungan hidup, dan [mengecualikan kategori industri tertentu dari persyaratan AMDAL](#). Secara total, 12 dari 14 klausul dalam AMDAL 2006 sebelumnya telah diubah dalam draf baru tersebut. Izin Lingkungan untuk tambang yang ingin memperluas operasi mereka juga telah dikesampingkan. Ini sepenuhnya menyimpang dari landasan hukum Undang-Undang (Perlindungan) Lingkungan 1986, yang [melemahkan tujuan keanekaragaman hayati dan iklim India](#). Draf AMDAL 2020 secara khusus akan berdampak pada wilayah Timur Laut negara India, rumah bagi banyak suku yang dilindungi oleh Lampiran Keenam dari Konstitusi India. Pasal 371 dan Lampiran Keenam memberi masyarakat kepemilikan atas sumber daya alam mereka, dan ketentuan draf AMDAL 2020 untuk mendirikan industri dalam jarak [100 km dari perbatasan internasional tanpa konsultasi publik](#) akan berdampak secara tidak proporsional pada masyarakat ini. Ketentuan AMDAL yang melemah di bawah draf AMDAL 2020 kemungkinan akan berdampak jangka panjang yang parah dengan membatasi pengawasan dan gagal menangani risiko sosio-ekologis. Selain itu, [proyek pembangkit listrik tenaga air Etalin berkekuatan 3.097 MW](#) gagal untuk mengatasi aktivitas seismik, risiko terkait perubahan iklim, tanah longsor dan dampak bencana pada masyarakat terkait bendungan. Pada akhirnya, draf AMDAL 2020 [mengusung pembangunan teknokratis](#) yang merugikan hak asasi manusia dan lingkungan, kekhawatiran yang juga telah diangkat oleh [Pelapor Khusus PBB](#).

Rezim Duterte di **Filipina** dikenal karena [membungkam oposisi, pembunuhan di luar hukum, dan tindakan represif terhadap perbedaan pendapat](#).⁹ Sebuah laporan Global Witness tentang pembela hak tanah dan lingkungan hidup menemukan bahwa 43 pembela HAM tewas dan ini menjadikan [Filipina negara paling mematikan kedua bagi para pembela hak pada tahun 2019](#), setelah Kolombia.¹⁰ Ketika digabungkan dan melihat ke masa depan, perkembangan ini menimbulkan kekhawatiran serius.

- **Perbedaan pendapat sebagai terorisme.** Selama pandemi, RUU Senat No. 1083 disetujui sementara DPR menyetujui RUU No. 6875. Keduanya dikonsolidasikan untuk membuat Undang-Undang Republik 11479, atau Undang-Undang Anti-Terrorisme 2020, yang kemudian ditandatangani oleh Presiden Duterte pada tanggal 18 Juli 2020 untuk menggantikan UU Keamanan Manusia tahun 2007. Hal itu dilakukan berlawanan dengan kritik internasional, termasuk dari [OHCHR](#). Undang-Undang Anti-Terrorisme mengaburkan batas antara aktivisme hukum, perbedaan pendapat, dan terorisme yang memicu [ketakutan meluas akan penyalahgunaan kekuasaan yang terus terjadi dan meningkat](#) oleh pemerintah Duterte.¹¹
- **Kriminalisasi Masyarakat Adat.** Sebuah undang-undang kontroversial disahkan beberapa bulan sebelum pandemi dan mendapat perlawanan kuat, [Perintah Eksekutif Presiden No. 70, disahkan pada Desember 2018](#),¹² digunakan secara ekstensif selama pandemi untuk membungkam orang dengan perbedaan pendapat dan selanjutnya mengkriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat (IPHRD). Dengan menargetkan organisasi dan selanjutnya memiliterisasi wilayah Masyarakat Adat, Perintah Eksekutif Presiden No. 70 menambah tanda peringatan dan ancaman yang sudah dihadapi oleh para aktivis.

Bagian 2: Stimulus dan Kompensasi bagi Korporasi

Usaha kecil dan menengah seringkali bergantung pada dukungan pemerintah untuk bertahan dari krisis. Namun, sebagai tanggapan terhadap COVID-19, pemerintah memprioritaskan perluasan sektor industri ekstraktif dan proyek pembangunan skala besar melalui ketentuan yang akan mengatur lingkungan ekonomi selama bertahun-tahun mendatang. Di bawah panji pembaruan ekonomi selama COVID-19, berbagai negara telah menerapkan sejumlah strategi ramah bisnis. Ini mencakup deregulasi, fasilitas perizinan atau insentif pajak. Wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal menjadi sasaran kegiatan ekonomi yang akan berkontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Indonesia telah memberikan kompensasi kepada bisnis melalui perpanjangan perizinan secara otomatis dan sempat mencabut persyaratan yang mengesahkan legalitas produk kayu. Kadang-kadang mobilisasi publik mampu melawan perkembangan tersebut, tetapi beberapa ketentuan kompensasi telah disahkan

⁹ A/HRC/44/22

¹⁰ Filipina adalah negara paling mematikan bagi para pembela hak pada 2018.

¹¹ Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sudah diberi label merah dan dianggap sebagai simpatisan komunis, dipenjara karena membela rumah leluhur mereka terhadap pembangunan proyek ekstraktif dan infrastruktur dan dihalangi dari pengorganisasian, Undang-Undang Anti-Terrorisme tahun 2020 kemungkinan besar akan digunakan untuk memadamkan perbedaan pendapat dan kritik apa pun terhadap pemerintah, termasuk yang dilakukan oleh Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal serta organisasi mereka.

¹² Perintah Eksekutif Presiden No. 70 adalah 'Melembagakan Pendekatan di Seluruh Negara dalam Mencapai Perdamaian yang Inklusif dan Berkelanjutan, Membentuk Satgas Nasional untuk Mengakhiri Konflik Bersenjata Komunis Lokal, dan Mengarahkan Adopsi Kerangka Perdamaian Nasional'.

yang akan memiliki implikasi jangka panjang pada hutan Indonesia serta Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang menghuninya.

- **Perpanjangan otomatis konsesi pertambangan batubara.** Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) direvisi tanpa partisipasi publik. Pasal 47 [memberikan perusahaan pertambangan jaminan perpanjangan 10 tahun, sebanyak dua kali](#). Dengan demikian, undang-undang baru ini akan menjamin perpanjangan otomatis konsesi Pertambangan Batubara, sehingga memastikan dominasi oligarki industri batubara selama 20 tahun ke depan.
- **Perpanjangan otomatis izin konsesi perkebunan, hutan taman industri dan bubur kayu.** Kementerian Agraria Indonesia mengumumkan perpanjangan izin secara otomatis hingga akhir 2020 sebagai kompensasi perusahaan atas kerugian yang dialami terkait COVID.
- **Mendorong industri kayu ilegal.** Kementerian Perdagangan berupaya mencabut persyaratan legalitas ekspor kayu. [Sistem Verifikasi Legalitas Kayu \(SVLK\)](#) dirintis oleh Indonesia pada tahun 2003, dan jika dihapusnya persyaratan legalitas ini akan berdampak besar pada deforestasi dan pelacakan kayu ilegal. Dengan dicabutnya syarat legalitas pada 27 Mei 2020, kekhawatiran akan kayu ilegal membanjiri pasar,¹³ dan penggundulan hutan semakin meningkat. Namun LSM, akademisi, sektor swasta dan bahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong dan berhasil mengembalikan persyaratan legalitas tersebut.

Alih-alih memperkuat penerapan ketentuan lingkungan hidup, **India** malah membatalkan protokol yang menetapkan dan mencegah pelanggaran. Perkembangan ini disertai dengan kegagalan untuk mengikutsertakan dan berkonsultasi dengan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal secara memadai dalam proyek yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi cara hidup tradisional mereka.

- **Tidak ada ketentuan untuk izin berbasis video dalam undang-undang lingkungan India.** Persetujuan izin lingkungan yang cepat untuk berbagai proyek membawa risiko pada pengawasan administratif.¹⁴ Antara 24 Maret – 30 Juni, sebuah [analisis](#) dari Risalah rapat Forest Advisory Committee dan Expert Appraisal Committee menunjukkan bahwa sekitar 120 proyek direkomendasikan, 90 proyek ditangguhkan, 30 proyek dikembalikan, dan 2 proyek ditolak. Rapat dilakukan melalui panggilan konferensi video karena pembatasan karantina wilayah. Seperempat dari proyek yang direkomendasikan jatuh di distrik [Lampiran Kelima dan disetujui](#) tanpa uji tuntas yang disyaratkan, tanpa menghormati hak-hak yang dijamin dalam FRA dan dengan mengabaikan hak Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC). Sebanyak [30 proyek yang](#)

¹³ 40% produk kayu impor Eropa berasal dari Indonesia.

¹⁴ Pada tanggal 27 Mei, ledakan dan kebakaran susulan terjadi di sumur minyak milik Oil India Ltd (OIL) di Assam, 17 hari setelah Proyek Baghjan OIL menerima Izin Lingkungan dari Kementerian Lingkungan, Hutan dan Perubahan Iklim India. OIL memiliki tiga proposal lain untuk eksplorasi minyak dan gas yang sedang menunggu Izin Lingkungan dari Kementerian Lingkungan, Hutan dan Perubahan Iklim India. Karena semua proyek eksplorasi minyak dan gas di darat maupun lepas pantai termasuk dalam kategori 'B2' dan dibebaskan dari audiensi publik, proposal OIL tidak akan menjalani proses dengar pendapat publik. Sehubungan dengan banjir tahunan yang berulang kali terjadi di sepanjang sungai Brahmaputra, dan kedekatan ledakan dengan sungai dan ekosistem yang rentan, insiden tersebut menimbulkan risiko yang parah bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal serta satwa liar baik di India maupun di bagian hilir di Bangladesh. Pada akhir Juni 2020, upaya untuk memadamkan api terhambat oleh banjir ini. Ini menunjukkan bagaimana ketentuan yang sudah lemah yang memungkinkan proyek-proyek seperti Baghjan OIL perlu diperkuat, bukan dilemahkan atau dihapus seluruhnya. Proyek Baghjan OIL telah disetujui berdasarkan AMDAL 2006, yang menekankan kebutuhan untuk memperkuat ketentuan AMDAL daripada melemahkannya seperti Draf AMDAL 2020.

[dibuka oleh Kementerian Lingkungan, Hutan dan Perubahan Iklim berada di hotspot keanekaragaman hayati yang rentan.](#)

- **Komersialisasi sektor pertambangan batubara.** Pada 11 Juni 2020, Pemerintah India meluncurkan lelang batubara baru bertema "[Melepaskan Batubara: Harapan Baru untuk Atmanirbhar Bharat](#)" yang melibatkan [41 tambang batubara di lima negara bagian](#). Langkah ini disertai dengan undang-undang lain, seperti amandemen Pasal 8A Undang-Undang Tambang dan Mineral (Peraturan dan Pembangunan) tahun 1956, yang secara otomatis akan memperpanjang semua persetujuan, izin dan hak sah kepada penawar yang memenangkan sewa pertambangan. Persetujuan ini selanjutnya dikecualikan dari izin yang diberikan berdasarkan UU Konservasi Hutan 1980 dan UU Hutan Hak 2006 (*Forest Rights Act/FRA*) untuk jangka waktu dua tahun. Amandemen UU Tambang Batubara (Ketentuan Khusus) 2015 memungkinkan operasi industri batubara dilakukan oleh perusahaan swasta untuk pertama kalinya. Reformasi besar-besaran di sektor pertambangan India, khususnya batubara, merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan semakin memperumit implementasi reforma tenurial hutan yang diperkenalkan oleh *Forest Rights Act, 2006/FRA*. Tambang batubara ini juga terletak di [tanah adat dan hutan keanekaragaman hayati yang penting](#).
- **Menghapus perlindungan tenaga kerja.** Ketika mendukung pelaku bisnis, Negara Bagian dan pemerintah Pusat India secara sistematis [mengurangi hak-hak tenaga kerja](#) sebagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perombakan menyeluruh ini akan melemahkan perlindungan terkait jam kerja, upah, lembur, kesehatan dan keselamatan kerja dan lain-lain. Dengan melakukan itu, India akan membebaskan keuangan pemulihan ekonomi pada populasi paling rentan di negara itu, yang seringkali menjadi kelompok paling terdampak selama karantina wilayah diberlakukan pemerintah.
- **Membuka lahan pertanian untuk industri.** Negara bagian Assam mengeluarkan peraturan tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan memudahkan bisnis dengan menghilangkan kebutuhan [persetujuan, izin atau lisensi](#) pembukaan lahan pertanian untuk keperluan industri. Pemerintah pusat India juga mempertimbangkan untuk membentuk Perusahaan Pengelolaan Tanah Nasional untuk [memfasilitasi monetisasi lahan](#) yang bersumber dari "tanah terlantar" di atas kertas, tetapi dalam praktiknya secara adat dikelola oleh masyarakat. Hal ini akan menyebabkan konflik lahan, penggusuran, gangguan mata pencaharian dan kriminalisasi terhadap masyarakat rentan yang tidak diakui hak milik atas tanah dan sumber daya alam mereka. Gubernur Karnataka mengumumkan Ordonansi Reforma Pertanahan Karnataka (Amandemen) 2020, yang akan merevisi Undang-Undang Reforma Pertanahan Karnataka, 1961.¹⁵ Dengan demikian akses lahan pertanian dibuka bagi non-petani dan batas maksimal tanah yang dapat dikuasai dirubah. Asosiasi petani memprotes langkah tersebut karena membuka jalan [pengadaan tanah skala besar](#) yang akan menguntungkan aktor non-negara yang lebih besar dan lebih kuat.

Setelah ECQ dan kekuasaan eksekutif yang diperbarui, **Filipina** mengalihkan anggaran dari cabang pemerintahan lainnya untuk mendorong rencana infrastruktur yang menargetkan tanah leluhur. Sektor

¹⁵ Amandemen, yang diundangkan pada 13 Juli 2020, menghapus Pasal 79A, 79B dan 79C dari Undang-Undang tersebut yang menetapkan [pembatasan ketat atas kepemilikan lahan pertanian](#).

infrastruktur ini dapat melanjutkan kegiatannya sekaligus berpotensi mempermudah penyebaran COVID-19 ke pelosok pedesaan.

- **Infrastruktur sebagai pembalut luka pandemi.** Pada 4 Juni 2020, pemerintah mengesahkan RUU DPR No. 6815, Percepatan Pemulihan dan Stimulus Investasi untuk Ekonomi Filipina (ARISE Philippines), yaitu paket stimulus senilai US\$ 2,6 miliar. Sekitar 50% dari dana tersebut telah dialokasikan bagi proyek infrastruktur untuk [menghidupkan kembali perekonomian](#). Namun, sejak saat itu anggaran telah dipangkas menjadi US\$ 340 juta, menjadikan stimulus fiskal Filipina salah satu yang [terkecil di dunia](#). Beberapa proyek infrastruktur yang akan menerima dukungan stimulus berada di [tanah leluhur Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal](#) dan diperebutkan secara luas.¹⁶ RUU tersebut belum disahkan menjadi UU.
- **Proyek pembangunan berorientasi pasar menargetkan tanah leluhur.** Program unggulan Rencana Pembangunan Filipina 2017-2022 “Membangun Membangun Membangun (*Build Build Build/BBB*)”, dihidupkan kembali dalam konteks pandemi untuk mempromosikan “[zaman keemasan](#)” infrastruktur. Ada lebih dari 100 proyek di dalam BBB, banyak di antaranya menargetkan wilayah leluhur Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Lebih dari 110.000 masyarakat adat dari setidaknya 106 desa bisa terdampak oleh lima proyek bendungan yang diusulkan, berikut dengan 230 permohonan penambangan yang disetujui, merambah setidaknya 542.245 hektar tanah leluhur.¹⁷ Duterte menggunakan kekuasaan eksekutifnya di bawah **UU Bayanihan (diperpanjang dalam Bayanihan 2)** untuk mengalihkan dan mengambil dana dari cabang pemerintahan lainnya, melalui RUU Senat No. 1474 untuk memprioritaskan pinjaman bagi proyek infrastruktur di BBB, yang mengalokasikan US\$ 1,3 miliar pada tahun fiskal 2021.

Bagian 3: “Solusi” Pandemi yang Menggerogoti Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

[Pandemi yang berlarut-larut](#) meningkatkan risiko krisis pangan. Karantina wilayah telah berdampak luas pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan persediaan makanan, mengakses fasilitas dasar, dan layanan kesehatan. **“Solusi ”yang menggerogoti hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal semakin membebani Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dan kemampuan mereka untuk mengumpulkan, memanen, menanam, dan mendistribusikan makanan.**

- **Membatasi akses ke hutan.** Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan, Hutan dan Perubahan Iklim **India** pada 6 April 2020 menginstruksikan semua negara bagian dan wilayah persatuan untuk memastikan pengurangan interaksi manusia dan satwa liar dengan membatasi pergerakan orang di Taman Nasional/Cagar Alam/Cagar Harimau. Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sangat bergantung pada Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk mata pencaharian mereka dan pembatasan ini akan [berdampak pada 3 hingga 4 juta orang yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan lindung](#). Membatasi akses masyarakat pedesaan ke sumber daya hutan yang

¹⁶ Lihat catatan kaki sebelumnya. Informasi diberikan oleh Cordillera Peoples Alliance.

¹⁷ Informasi diberikan oleh Cordillera Peoples Alliance.

menjadi sumber makanan dan obat-obatan sama dengan menghilangkan sumber penghidupan penting. Karantina wilayah juga bertepatan dengan musim panen, sehingga [berdampak pada kelangsungan hidup sekitar 275 juta orang](#) di seluruh negeri.

- **Mencetak sawah di lahan yang masih bersengketa.** Presiden Joko Widodo menginstruksikan badan usaha milik negara untuk mencetak sawah baru seluas [900.000 hektar di Kalimantan Tengah, Indonesia](#). Sebagian dari wilayah ini merupakan lahan pertanian tradisional Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal serta lahan gambut. Program pemerintah yang diusulkan ini kemungkinan besar akan menyebabkan lebih banyak konflik agraria dan perampasan tanah jika tidak dilakukan untuk dan oleh rakyat, dan akan juga membahayakan pencapaian Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional berdasarkan Perjanjian Paris.
- **Menargetkan tanah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal untuk produksi pangan.** Departemen Pertanian (DA) **Filipina** dan Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (NCIP) telah merilis proposal bersama untuk meningkatkan produksi pangan yang menargetkan tanah yang "[menganggur](#)" di wilayah Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal. Program "Menanam Menanam Menanam (*Plant Plant Plant/PPP*)" telah dikecam sebagai cara membuka tanah leluhur untuk pertanian industri dan sebagai bentuk perampasan tanah. [Tanah ini tidak menganggur](#), dan PPP akan menghalangi tindakan kolektif dan praktik tradisional dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang mendukung penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan

Kesimpulan

Kerentanan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal telah diperparah oleh pandemi COVID-19. Kriminalisasi, korupsi, ancaman, kekerasan gender, industri ekstraktif, kelambanan negara dan akses terbatas pada informasi yang sesuai budaya semuanya telah diperburuk. Namun, komunitas ini masih merespons dengan [ketahanan dan keberhasilan komunal](#). Dasar dari keberhasilan ini adalah tindakan yang ditentukan oleh masyarakat sendiri, sistem tata kelola tradisional, dan jaminan hak kepemilikan kolektif atas tanah dan sumber daya alam.

Solidaritas di antara organisasi yang mewakili Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal telah menjadi landasan respons ini. Misalnya, di seluruh Indonesia, masyarakat mulai bersiap menghadapi krisis pangan pada awal Maret dengan prinsip [wilayah bermartabat](#). Solidaritas desa-kota digerakkan oleh [Gerakan Solidaritas Lumbung Agraria](#) dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), di mana petani dan nelayan dengan stok surplus mendonasikan dan menjual hasil bumi mereka dengan harga terjangkau untuk didistribusikan kepada kaum buruh di perkotaan. Contoh ini juga menyoroti pentingnya hak tenure dan penguasaan lahan oleh masyarakat: sebagian besar produk yang didukung oleh KPA ditanam di lahan yang disengketakan.

Masyarakat juga telah memanfaatkan hak atas tanah mereka untuk menanggapi krisis. Desa-desa di **India** seperti Kukdale di [distrik Gadchiroli Maharashtra](#), telah memanfaatkan kemandirian ekonomi mereka yang didukung oleh Hak Sumber Daya Hutan Komunitas untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang lebih rentan dengan persediaan mingguan. Di Riau, sebuah provinsi di pulau Sumatera, Indonesia, pemuda Talang Mamak [berkontribusi pada ketahanan pangan desa mereka dan mempromosikan pemantauan berbasis masyarakat](#). Kedua contoh ini adalah jenis tanggapan yang terlihat di ratusan ribu desa Masyarakat

Adat dan Komunitas Lokal yang telah terorganisasi untuk memastikan kesehatan, keselamatan, dan mata pencaharian anggota komunitas mereka.

Sangat penting kiranya para legislator dan pemimpin di dunia, dalam tanggapan ekonomi pasca-COVID, mengambil inspirasi dari tindakan ini. Hak dan penentuan nasib sendiri dari Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal harus menjadi yang terdepan dalam paket stimulus untuk melindungi alam dan mencegah risiko pandemi di masa depan. Tidak ada kebangkitan ekonomi yang dapat dipertahankan dengan mengorbankan ruang demokrasi dari komunitas yang paling mampu melindungi sumber daya alam planet kita.

Tentang Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)

The Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) adalah organisasi regional yang didirikan pada tahun 1992 oleh gerakan Masyarakat Adat sebagai platform untuk membangun solidaritas dan kerjasama. AIPP secara aktif mempromosikan dan membela hak masyarakat adat dan hak asasi manusia; pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan hidup. Selama bertahun-tahun, AIPP telah mengembangkan keahliannya dalam pembangunan kapasitas di akar rumput, advokasi dan jaringan dari tingkat lokal hingga tingkat global, dan kemitraan dengan organisasi masyarakat adat, LSM pendukung, badan PBB dan institusi lainnya. Saat ini, AIPP punya 47 anggota dari 14 negara di Asia, dengan 7 aliansi / jaringan nasional masyarakat adat dan 35 organisasi lokal dan sub-nasional termasuk 16 organisasi berbasis etnis, 5 organisasi perempuan adat dan 4 organisasi pemuda adat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi <https://aippnet.org/>.

Tentang Koalisi untuk Keadilan Tenure di Indonesia

Koalisi untuk Keadilan Tenure di Indonesia adalah sebuah koalisi yang beranggota organisasi yang sangat beragam, namun mempunyai kepentingan bersama untuk memperjuangkan hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah, hutan dan sumber daya alamnya dengan mendorong agenda pengakuan Wilayah/Hutan Adat, memperluas ruang kelola masyarakat, dan mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria yang sejati. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi <http://koaliskeadilantenure.com/>.

Tentang Rights and Resources Initiative

Rights and Resources Initiative (RRI) adalah Koalisi global dengan lebih dari 150 organisasi yang berdedikasi untuk mengedepankan hak atas hutan dan sumber daya alam Masyarakat Adat, Keturunan Afro, Komunitas Lokal, dan perempuan dalam komunitas tersebut. Anggota RRI saling memanfaatkan kekuatan, keahlian, dan jangkauan geografis satu sama lain untuk mencapai solusi secara lebih efektif dan efisien. RRI menggunakan kekuatan Koalisi globalnya untuk memperkuat suara masyarakat lokal dan secara proaktif melibatkan pemerintah, lembaga multilateral, dan pelaku sektor swasta untuk mengadopsi reformasi kelembagaan dan pasar yang mendukung realisasi hak masyarakat. Dengan mengedepankan pemahaman strategis tentang ancaman dan peluang global yang diakibatkan oleh ketidakterjaminan hak atas tanah dan sumber daya alam, RRI mengembangkan dan mempromosikan pendekatan berbasis hak terhadap bisnis dan pembangunan, dan mengkatalisasi solusi efektif untuk meningkatkan reforma tenurial pedesaan dan meningkatkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

RRI dikoordinasikan oleh Rights and Resources Group, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington, DC. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.rightsandresources.org.

Mitra



Sponsor



Pandangan yang disampaikan di sini tidak harus dibagikan oleh lembaga yang telah dengan murah hati mendukung karya ini. Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution License CC BY 4.0.